

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Hasil dari penelitian yang diperoleh dari Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di bagian keuangan melalui observasi dan wawancara kelapangan, penulis menyimpulkan bahwa:

- I. Dalam melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pada kendaraan dinas dan peralatan kantor pada kantor Sekretaris Daerah Pesisir Selatan telah sesuai dengan siklus yang tertera dalam buku pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu Permendagri No. 19 tahun 2016. Siklus ini meliputi: pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan Pengendalian, serta ganti rugi.
- II. Hambatan dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah di bagian keuangan di kantor sekretariat daerah kabupaten pesisir selatan, berdasarkan data yang di dapat langsung dari dokumen dan wawancara bahwa rencana di anggarakan untuk tahun 2021 adalah senilai Rp 135.674.985. karna masa pandemi, rencana yang di anggarakan untuk tahun 2021 dapat setuju yang lebih diprioritaskan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada bagian keuangan kantor sekretariat daerah di bawah Rp 50.000.000. Maka akan di lakukan pembelian seara langsung.
- III. Evaluasi tingkat kesesuaian penataan aset tetap di bagian keuangan Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh tingkat kesesuaiannya sebesar 77% yaitu termasuk kategori sesuai, sehingga dalam implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah Kantor Sekretaris Daerah Pesisir Selatan masih belum berjalan secara optimal dikarenakan masih ada item kriteria yang tidak lengkap seperti keterangan nomor kode, nomor register barang, keterangan konstruksi, dan ukuran tidak lengkap.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberikan saran pada Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :

- Pada peraturan dan buku pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah diterapkan dan terlaksana dengan baik hanya saja memberikan kedisiplinan dan ketegasan tanggung jawab kepada pengguna barang kendaraan dinas dan peralatan kantor agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dari pemerintah.
- Penulis berharap ada penambahan pengurus barang dalam mengelola Barang Milik Daerah yang ada sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan Barang Milik Daerah.

